

ABSTRAK

Muhammad Nur Fadli. 105951105219. Penerapan Sanksi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Industri Kayu Ilegal Di Wilayah Kerja Pos Gakkum Mamuju Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dibimbing oleh Hasanuddin Molo dan M. Daud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat/badan usaha terhadap pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal dan mengetahui penerapan sanksi yang diberikan pada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pelanggaran umum yang terjadi meliputi pengangkutan kayu tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dan pengoperasian industri pengolahan kayu tanpa adanya izin resmi yaitu Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi menerapkan sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, penyitaan hasil hutan, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran berat seperti *illegal logging* dan pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana penjara dan denda besar. Penerapan sanksi terbukti memberikan dampak positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mengurus izin resmi dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi kehutanan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan di daerah terpencil, kurangnya pemahaman hukum oleh pelaku usaha, serta koordinasi antarinstitusi yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum, pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), serta penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menekan aktivitas industri kayu ilegal secara berkelanjutan.

Kata kunci : sanksi kehutanan, industri kayu ilegal, penegakan hukum

ABSTRACT

Muhammad Nur Fadli. 105951105219. Implementation of Sanctions for Alleged Forestry Crimes on Illegal Timber Industries in the Operational Area of the Mamuju Law Enforcement Post, Ministry of Forestry, West Sulawesi Province. Supervised by Hasanuddin Molo and M. Daud.

This study aims to identify violations committed by individuals/business entities in the illegal management/exploitation of timber forest products in illegal timber industries and to examine the sanctions imposed on such illegal activities. This research employs a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The findings reveal that common violations include transporting timber without valid documentation, such as the Timber Legality Verification Document (*Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/SKSHHK*) or the Community Timber Transport Permit (*Surat Angkut Kayu Rakyat/SAKR*), as well as operating timber processing industries without an official permit, namely the Primary Timber Forest Product Industry Business License (*Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK*). The Forestry Law Enforcement Agency (*Balai Penegakan Hukum Kehutanan/BPHK*) of the Sulawesi Region imposes administrative sanctions such as warnings, operational suspensions, confiscation of forest products, and even business license revocation. Meanwhile, criminal sanctions are applied for severe violations, including illegal logging and document forgery, punishable by imprisonment and substantial fines. The enforcement of sanctions has proven effective, as evidenced by the increasing number of businesses obtaining official permits and improved compliance with forestry regulations. However, its effectiveness remains hindered by weak monitoring in remote areas, a lack of legal awareness among business operators, and suboptimal interagency coordination. This study recommends strengthening legal education, utilizing the Forest Product Administration Information System (*Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH*), and ensuring fair and consistent law enforcement to sustainably suppress illegal timber industry activities.

Keywords: forestry sanctions, illegal wood industry, law enforcement